

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Ekonomi Makro

##### a. Pengertian Ekonomi Makro

Dalam ilmu ekonomi terdapat dua cabang yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang di maksud dengan ilmu ekonomi makro yaitu kajian aktivitas ekonomi sebuah negara sedangkan ekonomi mikro yaitu kajian tentang tingkah laku individual dalam ekonomi. Perbedaan yang esensial dalam kajian ilmu ekonomi mikro dan makro mencakup dua hal yaitu:

1. Adanya uang dalam ekonomi makro, sehingga nominal price menjadi faktor kajian penting. Dalam ekonomi mikro, yang terpenting adalah harga relative atau harga relatif pendapatan. Adanya uang inilah yang nantinya akan menghasilkan cabang ilmu ekonomi moneter.

2. Adanya penjual dan pembeli raksasa dalam ekonomi makro yaitu pemerintah. Kemampuan dan perilaku pemerintah membelanjakan dan menabung uangnya dalam jumlah yang sangat besar menjadi kajian

tersendirinya yang akan menghasilkan cabang ilmu ekonomi fiscal.<sup>1</sup>

Ekonomi makro juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau secara keseluruhan. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa, laju pertumbuhan output, laju inflasi, pengangguran, neraca pembayaran dan kurs. Ekonomi makro memberikan penekanan pada perilaku kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi-kondisi seperti perilaku konsumsi dan investasi, faktor penentu perubahan upah dan harga, kebijakan fiskal dan moneter, stok uang beredar dan lainnya.<sup>2</sup>

Ekonomi makro juga merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas permasalahan ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal.

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto, A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .2011).

<sup>2</sup> Ali Ibrahim Hasyim *Ekonomi Makro*. (Jakarta: Kencana . 2016)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta, seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian.

Tujuan Makro Ekonomi, adalah mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi melalui:

1. Menstabilkan kegiatan ekonomi
2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh
4. Menghindari masalah inflasi.<sup>3</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Ekonomi Makro**

Dalam makro ekonomi terdapat pula faktor perilaku, institusi dan struktural di dalam analisisnya. Pola nonlinier juga masuk dalam makroekonomi.

##### **1. Tingkat Output Agregat (Aggregate Output)**

Ukuran utama dari keadaan perekonomian adalah aggregate output. Aggregate output adalah total kuantitas barang dan jasa yang diproduksi

---

<sup>3</sup> Aulia, Telisa Falianty. *Teori Ekonomi Makro Dan Penerapannya Di Indonesia*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. 2019)

suatu perekonomian (negara) dalam suatu periode. Suatu periode di mana output yang dihasilkan suatu perekonomian mengalami penurunan disebut dengan resesi. Dan jika penurunan output terjadi dalam waktu lama maka kondisi ini disebut dengan depresi.

Ketika tingkat produksi menurun, maka jumlah barang dan jasa yang beredar menjadi lebih sedikit, tingkat harga akan naik, dan standar hidup masyarakat pun akan menurun. Karena ketika perusahaan memutuskan untuk menurunkan output yang diproduksinya, maka banyak pekerja yang akan dipecat, sehingga pendapatan masyarakat akan menurun, dan pengangguran akan meningkat. Pemerintah akan selalu memperhatikan tingkat produksi tiap periode di negaranya. Yang menjadi perhatian bagi pemerintah bukan semata-mata total barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahunnya, namun seberapa besar tingkat pertumbuhan output tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan yang tinggi mengartikan tingginya standar hidup masyarakat dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

## 2 Tingkat Harga Agregat (Aggregate Price Level)

Peningkatan harga secara keseluruhan/umum (inflasi) menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Inflasi adalah peningkatan harga barang secara keseluruhan dan konsisten. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari suatu negara dengan negara lainnya. Pada suatu periode tingkat inflasi bisa rendah, dan dapat pula tinggi atau bahkan sangat tinggi (bisa mencapai beberapa ratus atau beberapa ribu dalam setahun). Tingkat inflasi yang sangat tinggi disebut dengan hyperinflations. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu manarak, dan kegiatan perolehan car keserahan. Salah satu cara untuk menurunkan tingkat inflasi adalah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pekerja yang memiliki tingkat pendapatan akan menurun taraf hidupnya jika terjadi inflasi. Jika tidak diturunkan, inflasi akan memperburuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Inflasi cenderung mengurangi tingkat konsumsi, mengurangi produktivitas, mengurangi ekspor dan meningkatkan impor. Sehingga inflasi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penurunan inflasi merupakan tujuan

utama bagi pemerintah, terutama jika negara tersebut mengalami hyperinflations

### 3. Pengangguran (Unemployment)

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum mendapatkannya. Permasalahan pengangguran sangat berhubungan dengan tingkat output. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah menurunnya permintaan agregat. Semakin menurunnya permintaan akan barang dan jasa maka menurun pula keinginan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Penurunan produksi ini memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, terutama pengurangan tenaga kerja karena membayar upah merupakan biaya paling besar yang ditanggung perusahaan.

Dari segi individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Dari segi ekonomi, jika terjadi pengangguran berarti pendapatan masyarakat akan menurun, dan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ketiadaan

pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Sehingga akan semakin mengurangi permintaan agregat. Dari segi sosial, pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kekacauan politik dan kondisi sosial (banyak pencurian, perampokan, dan penyakit sosial lainnya). Pada saat pengangguran tinggi daya beli masyarakat biasanya menurun dan akan menurunkan inflasi.

#### 4. Siklus Bisnis

Pada dasarnya, output agregat selalu mengalami perubahan baik naik turun. Gerakan naik atau turun agregat ini biasa disebut sebagai siklus usaha (business cycle). Pola naik turunnya output agregat tersebut memiliki renggang waktu yang berbeda, ada yang memiliki jangka waktu pendek (3-11 tahun), jangka waktu panjang (30-70 tahun), atau jangka waktu yang sangat panjang (200 tahun). Perbedaan tenggang waktu siklus usaha tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu siklus jangka pendek biasanya banyak dipengaruhi oleh perubahan musim, siklus jangka panjang dipengaruhi oleh perubahan teknologi, sedangkan siklus jangka waktu yang

panjang sekali biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat setempat. Ekonomi makro memandang siklus usaha merupakan hal yang harus mendapat perhatian penting mengingat dampak yang diakibatkannya sangat fatal bagi perekonomian. Dampak umum yang mungkin terjadi adalah jika pemerintah mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan akan mengakibatkan perekonomian depresi. Begitupun sebaliknya, ekspansi yang dilakukan secara berkepanjangan akan mengakibatkan inflasi dan pada akhirnya akan terjadi resesi. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk menghadapi siklus ekonomi atau biasa disebut kebijakan antisiklus (anti-cycle policies), disebut juga kebijakan counter cyclical.

#### 5. Stabilitas Nilai Tukar

Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional dan terbukanya perekonomian antarnegara, stabilitas nilai tukar memiliki peranan yang sangat penting. Nilai tukar yang stabil akan menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif, hal ini karena:

- a. stabilitas nilai tukar akan memengaruhi stabilitas harga dan inflasi.
- b. stabilitas nilai tukar penting untuk mendorong ekspor.
- c. stabilitas nilai tukar menciptakan kepastian dalam perekonomian sehingga pelaku-pelaku ekonomi dapat menciptakan prediksi dan antisipasi yang baik. Nilai tukar yang tidak stabil akan merugikan pelaku-pelaku ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, pemerintah melalui otoritas moneter berusaha untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar.<sup>4</sup>

### **c. Perkembangan Teori Makroekonomi**

Dalam tahun 1929-32 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan the Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya (ukuran dari tingkat kegiatan ekonomi

---

<sup>4</sup> Naf'an . *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta:Graha Ilmu.2014).

yang dicapai sesuatu negara) mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Kemunduran ekonomi yang serius itu meluas ke seluruh dunia-ke negara-negara industri lain maupun ke negara-negara miskin.

Kemunduran ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran kepada ahli-ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dan teori-teori ekonomi sebelumnya juga tidak dapat menerangkan mengapa peristiwa kemunduran ekonomi yang serius tersebut dapat terjadi. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkemuka pada masa tersebut, yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul: *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan diterbitkan pada tahun 1936.

Dalam Pandangan Utama Teori Keynes membahas dua aspek. Di satu pihak mengemukakan

beberapa kritik ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan sesuatu perekonomian. Kritik-kritik tersebut menunjukkan kelemahan-kelemahan dari pandangan yang menjadi landasan kepada keyakinan ahli-ahli ekonomi Klasik bahwa penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh selalu dicapai.

Di pihak lain menerangkan pula faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi sesuatu negara. Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sesuatu negara. Seterusnya Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar. edisi ke tiga*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2021)

#### **d.Pelaku Makro Ekonomi**

Dalam teori makroekonomi kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi lima kelompok besar, yaitu sebagai berikut.

1. Rumah Tangga, rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal dan faktor produksi lainnya. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa (output) yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Produsen, biasa disebut perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi yang disebut sebagai produsen.

3. Pemerintah, pemerintahan mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan-kebijakannya. Contoh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal atau disebut kebijakan APBN, yang berkaitan dengan pengeluaran atau belanja pemerintah, pajak dan transfer atau subsidi, kebijakan moneter seperti penentuan tingkat bunga diskonto, cadangan minimum bank umum di Bank Indonesia, operasi pasar terbuka dengan jual atau beli surat berharga oleh Bank Indonesia, dan kebijakan melalui himbauan moral pada bank umum. Kebijakan lainnya adalah kebijakan sisi penawaran, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksi sehingga dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga yang rendah dan mutu yang baik. Kebijakan ini antara lain seperti kebijakan pendapatan pekerja, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan mengendalikan kenaikan upah pekerja, yang menekankan (a) meningkatkan kegagalan keravi (b) meningkatkan efisiensi produksi, dengan memberan insentif pajak (pengurangan pajak, tax holiday).

4. Lembaga-lembaga Keuangan, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana, dan memberikan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mempermudah transaksi dalam perekonomian.

5. Negara-negara Lain, peranan negara lain dalam perekonomian adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian suatu negara dan sekaligus sebagai pembeli barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu negara. Dengan demikian, terjadi transaksi ekonomi yang disebut sebagai ekspor dan impor barang dan jasa, sekaligus transaksi modal dan keuangan internasional.<sup>6</sup>

#### **e. Masalah Ekonomi Makro**

Salah satu permasalahan ekonomi khususnya ekonomi makro yaitu neraca pembayaran internasional atau neraca pembayaran (balance of

---

<sup>6</sup> Prawoto..Nano, *Pengantar Ekonomi Makro*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2019)

payments). Dilansir dari buku Ekonomi Makro (2020) oleh Abdul Rahman Suleman, ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas kondisi perekonomian negara atau kawasan, secara detail dan menyeluruh (komprehensif). Selain neraca pembayaran masih ada beberapa permasalahan ekonomi makro lainnya. Lima permasalahan ekonomi makro yaitu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan tidak stabilnya kegiatan ekonomi.

#### a. Pengangguran

Pengangguran terjadi karena ada kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran juga disebabkan oleh kesenjangan informasi dan keahlian yang dimiliki.

Cara mengatasi pengangguran: secara umum pengangguran dapat diatasi dengan beberapa cara sebagai berikut: Mengadakan pelatihan tenaga kerja Menambah lapangan pekerjaan Meningkatkan daya beli masyarakat Memberi informasi secepat mungkin apabila lowongan kerja

tersedia Membuka proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, dan lainnya

b. Permasalahan pertumbuhan ekonomi

Umumnya permasalahan ekonomi yang utama yaitu pembagian pendapatan nasional yang tidak merata. Nilai Gross Domestic Product (GDP) tidak bisa dijadikan patokan tentang miskin atau kaya sebuah negara.

Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi: Pertumbuhan ekonomi mengacu pada tingkat produksi barang dan jasa di masyarakat. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa terhadap Bisnis Tidak stabilnya kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan Salah satunya kebutuhan konsumsi masyarakat tidak terpenuhi. Akibat ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Cara mengatasi tidak stabilnya kegiatan ekonomi: Cara mengatasinya

adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, menjamin ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat.

c. Inflasi.

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, karena harga merupakan indikator penentuan inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Dengan demikian, bila dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang dan bersifat sementara, maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya.

d. Ketimpangan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk

negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Transaksi-transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa, dalam bentuk ekspor maupun impor, transaksi finansial seperti pemberian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal di luar negeri dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri dan bantuan dari luar negeri.

Bila jumlah pembayaran ke luar negeri tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh dari luar negeri, selisihnya dapat berupa surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan merupakan masalah apabila ketidakseimbangan tersebut cukup besar. Kalau kenyataan itu terjadi, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya.

Permasalahan ekonomi makro jangka panjang menyangkut persoalan pertumbuhan di bidang ekonomi. Masalah ini pada dasarnya menyangkut bagaimana mengatur perekonomian agar terdapat keserasian antara pertumbuhan penduduk,

pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Ketika keserasian ini tercapai, maka pertumbuhan ekonomi sebuah negara akan mengalami kondisi yang optimal.

Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menjaga nilai ekspor dan impor agar seimbang. Nilai ekspor tidak boleh lebih tinggi dibanding nilai impor. Begitu pula nilai impor yang harus tetap terkendali dan tidak boleh lebih tinggi dibanding ekspor.<sup>7</sup>

## **B. Ekonomi Makro Islam**

### **a. Pengertian Ekonomi Makro Islam**

Ekonomi Makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut beberapa orang mengenai ekonomi makro islam yaitu :

---

<sup>7</sup> Rahman Abdul Suleman, dkk .*Ekonomi Makro*.(Medan : Kita Menulis .2020)

<sup>8</sup> Huda,nurul,et.al . *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoreti*. (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group . 2008).

1. Menurut M.Akram Khan ilmu ekonomi makro Islam yaitu ilmu ekonomi yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.
2. Menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>9</sup>

#### **b.Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Islam merupakan agama Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Perekonomian merupakan bagian dari kehidupan manusia maka sudah dipastikan telah diatur dalam sumber yang mutlak yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi landasan dasar kehidupan umat manusia. Ekonomi islam secara mendasar berbeda dari ekonomi lainnya dari tujuan, bentuk dan lainnya. Sistem ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang mencegah terjadinya permasalahan ekonomi

---

<sup>9</sup> Huda, nurul, et. al. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group., 2008).

yang kapitalis dan komunis. Sistem ekonomi Islam sendiri menyelesaikan permasalahan perekonomian sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam yaitu:

1. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk kepada Allah sang pemilik dan pencipta. Firman Allah dalam QS. an-Najm (53):31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ  
أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى  
٣١

Artinya : “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada

*orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”.*

2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah ,manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
3. Beriman kepada hari kiamat merupakan asas penting dalam suatu system ekonomi islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali karena ia sadar bahwa semua perbuatannya akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh AllahSWT.

Selain dari asas filsafat tersebut ,ekonomi islam juga memiliki nilai-nilai tertentu yaitu :

1. Nilai dasar kepemilikan menurut ekonomi islam
  - a. Kepelikan bukan lah penguasa mutlak atas sumber-sumber ekonomi ,tetapi setiap orang maupun badan di tuntutan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber tersebut.
  - b. Lama kepemilikan manusia stas suatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia.

- c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi hak milik umum.

## 2. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sifat boros. Seperti yang terdapat dalam QS.al-Furqan(25):67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*.

## 3. Keadilan

Keadilan dalam Al-quran, kata adil di sebut lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran islam, terutama dalam kehidupan hokum social, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus di terapkan dalam kehidupan

ekonomi seperti proses distribusi, produksi konsumsi, dan kegiatan lainnya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, dan hibah.<sup>10</sup>

### **c. Manfaat dan Tujuan Ekonomi Islam**

#### Manfaat Ekonomi Islam

Apabila mengamalkan ekonomi syariah maka datang manfaat yang besar untuk umat muslim, yang mana manfaat ekonomi syariah yaitu:

- Terwujudnya integritas muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak setengah-setengah. Apabila ditemukan muslim yang tetap bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional artinya menunjukkan bahwa ke Islamannya belum kaffah.
- Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik itu bank, asuransi, pegadaian ataupun Baitul Maal wat Tamwil akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat.

---

<sup>10</sup>Huda, nurul, et.al . *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group . 2008)..

- Keuntungan di dunia didapat dari bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur ribat yang diharamkan oleh Allah.
- Praktik ekonomi yang didasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, karena sudah mengamalkan syariat Allah.
- Diamalkannya ekonomi syariah dengan lembaga keuangan syariah, artinya mendukung kemajuan lembaga ekonomi ummat Islam.
- Diamalkannya ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah artinya mendukung usaha pemberdayaan ekonomi ummat. Karena dana yang dikumpulkan akan dihimpun dan disalurkan dengan sektor perdagangan riil.
- Diamalkannya ekonomi syariah artinya mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya bisa disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal

#### Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi syariah tidak berbeda dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan

dunia dan akhirat dengan tata kehidupan yang baik dan terhormat. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut adalah tujuan ekonomi syariah:

- Memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya
- Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat
- Mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah
- Menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian

Ada tiga sasaran hukum Islam yang memberitahukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia yaitu:

- Penyucian jiwa supaya setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan untuk masyarakat dan lingkungannya.
- Tegaknya keadilan didalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah meliputi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamallah.
- Dicapainya suatu kemaslahan . Para ulama setuju bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas meliputi lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan,

keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan, keluarga dan keturunan (Al Nasl) dan keselamatan harta benda (Al Mal).<sup>11</sup>

#### **d.Kebijakan Makroekonomi Islam**

Prinsip Islam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya adalah bagaimana sumber daya sebagai karunia Allah Swt. dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan makroekonomi Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan nilai dan norma Islam. Hal ini selaras dengan prinsip dasar dari tujuan syariah Islam (maqoshidus syariah), yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan atas kepercayaan (hifdhun dien) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kebenaran agama dan sumber autentiknya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai jalan kehidupan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.
2. Perlindungan jiwa (hifdhun nafs) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga agar ada

---

<sup>11</sup> Maharani Dewi. *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial Ekonomi*. (ISSN 1999-9950. Juni 2018).

perlindungan atas hak hidup dan kehidupan manusia. Melindungi kehormatan manusia dan menjaga dari perilaku yang dapat mengancam jiwa manusia.

3. Perlindungan akal (hifdhul 'aql) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kesehatan akal dan penggunaan akal secara benar untuk kemaslahatan umat.

4. Perlindungan harta (hifdhul maal) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga hak milik atas harta dan bagaimana agar harta dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia dan mencegah dari tindakan penyalahgunaan harta yang dapat merugikan orang lain.

5. Perlindungan nasab (hifdhun nasab) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kebersihan dan kejelasan atas garis nasab (keturunan) seseorang sebagai dasar dalam menentukan perwalian dan masalah waris.

Tujuan dari kebijakan makroekonomi dalam Islam yaitu terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang penuh barokah dan ampunan dari

Allah Swt. karena kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan syariat-Nya.

Sehingga kebijakan ekonomi makro dalam Islam adalah mendorong aktivitas ekonomi, sehingga dapat terwujud masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dalam lindungan dan karunia dari Allah Swt. yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dalam bentuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan secara memadai serta terpenuhinya kebutuhan rohani dalam bentuk rasa aman, rasa bahagia, perlakuan yang adil, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kebijakan makroekonomi Islam yaitu mendorong kegiatan ekonomi baik pada sektor moneter maupun sektor riil untuk berjalan sesuai dengan syariat Allah Swt. dan menghindarkan perilaku dan aktivitas ekonomi yang menyimpang dari syariat Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yuliadi.imamudin . *Teori Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta:PT Raja Garfindo Persada. 2019)

## **C.Inflasi dan Jenis-Jenis Inflasi**

### **a.Sejarah Inflasi di Indonesia**

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang dialami semua negara didunia. Inflasi juga merupakan gejala kenaikan tingkat harga umum secara terus menerus. Suatu Negara yang sedang membangun, pemerintahannya melalui otoritas moneter akan selalu berusaha mengendalikan inflasi pada tingkat ideal.<sup>13</sup>

Inflasi Indonesia terjadi pada tahun 1962-1965 yaitu berada diatas 100% (yearon-year), salah satu penyebabnya adalah pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek besar seperti pembangunan Monas . Pemerintah Indonesia mencetak uang dalam jumlah banyak mungkin dengan tujuan untuk menambah kas negara. Ditengah situasi ekonomi dan politik yang amat buruk, pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan redominasi atau penyederhanaan nilai mata uang

---

<sup>13</sup> Adwin S.Atmadja,Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya,Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.1 No.1(May1999)

tanpa mengurangi nilai tukar diterbitkan pecahan uang baru Rp.1 yang memiliki daya beli setara dengan Rp.1.000. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan redominasi, apalagi di negara kepulauan yang luas seperti di Indonesia menambah kebingungan di masyarakat yang tentunya memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda.

Kebijakan pemerintah ini tidak berhasil meredam inflasi, sebaliknya harga-harga tetap naik tinggi yang mengakibatkan terjadinya hiperinflasi. Hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali, dimana terjadi lonjakan harga secara cepat dan tiba-tiba, tanpa adanya kenaikan pendapatan secara umum, sehingga jumlah uang yang beredar terlalu banyak, namun nilai mata uang turun secara drastis. Ciri khas inflasi diantaranya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap uang, dimana begitu mereka mendapatkan uang akan serta merta dibelanjakan karena adanya kekhawatiran nilai uang akan terus menerus merosot.

Faktanya bahwa pada tahun 1960-an ekonomi Indonesia hancur karena inflasi dan hutang sementara ekspor menurun. Sepanjang dekade 1960-an, inflasi rata-rata sebesar 196,08% dengan tingkat paling parah

terjadi pada tahun 1966 (635,35%). Hanya pada tahun 1969 saja inflasi berada pada level rendah (9,89%). Sejak saat itu pemerintah berusaha untuk mengendalikan laju inflasi di Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya, diantaranya strategi pembangunan jangka panjang dan terarah. Hasilnya pada tahun 1969-1971, inflasi di Indonesia berada dibawah level 10%. Pada rentang waktu tahun 1972 sampai dengan tahun 1980-an laju inflasi rata-rata berada pada level dua digit.<sup>14</sup>

Kemudian pada tahun 1984-1996 laju inflasi dapat dikendalikan pada level satu digit. Pada tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Thailand menyebar ke negara-negara di Asia termasuk di Indonesia. Berawal dari krisis nilai tukar Baht Thailand pada bulan Juli 1997, pada tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara.

Pada Juni 1997, banyak yang berpendapat bahwa Indonesia masih jauh dari krisis karena disaat itu inflasi yang rendah, surplus neraca perdagangan

---

<sup>14</sup> Sirtal Sirtalya J Rando, Debby Ch. Rotinsulu, Ita Pingkan Fasnje Rorong, *Analisis Faktor-faktor Penentu Inflasi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.22 No.1 (2021).

lebih dari US\$900 juta, cadangan devisa cukup besar lebih dari US\$20 Miliar. Sebelum tahun 1997 tercatat rupiah menguat terhadap dollar sehingga banyak perusahaan di Indonesia yang meminjam dalam bentuk dollar.

Terpuruknya kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa, jatuh tempo hutang luar negeri membuat Rupiah yang ditutup pada level Rp4.850/dollar AS pada 1997. Hanya dalam kurun waktu satu tahun nilai rupiah mengalami depresiasi mencapai 600%. Pada bulan Juli 1998, 1 dolar AS dihargai Rp16.650. Meski begitu, tanggal 31 Desember 1998 nilai rupiah mulai menguat ke angka Rp8.000 per dolar. Efek krisis moneter makin terasa beriringan dengan turunnya kepercayaan pasar dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang tidak jelas untuk menangani krismon yang terjadi.

Kerusuhan dan protes kepada pemerintah yang terjadi meluas diseluruh Indonesia saat berakhirnya Orde Baru memicu inflasi sebesar 77,63% pada 1998. Terjadi lonjakan harga-harga barang diikuti dengan melemahnya nilai tukar Rupiah pada saat itu. Inflasi tidak hanya menjadi perhatian bagi bank sentral, pemerintah maupun dunia usaha, tetapi juga bagi

masyarakat umum karena inflasi langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Bahkan bagi sebagian masyarakat kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok menjadi beban hidup yang berat. Bagi dunia usaha laju inflasi dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menyulitkan suatu perencanaan, karena kecenderungan bagi dunia usaha tidak termotivasi untuk melakukan tabungan dan investasi. Sedangkan bagi pemerintah tingkat inflasi menjadi perhatian pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang muara akhirnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pengaruh inflasi terhadap yang luas pada masyarakat, maka setiap negara senantiasa berupaya untuk mengendalikan laju inflasi agar tetap rendah dan stabil. Inflasi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi dan variable-variabel yang mempengaruhinya.

Kemudian, pada 1999 laju inflasi langsung turun dan hanya sebesar 2% . Ini juga merupakan angka inflasi terendah setelah berlangsungnya reformasi. Dalam 20 tahun terakhir, inflasi tertinggi

tercatat pada 2005, yakni mencapai 17,1% dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tahun 1999 hingga 2009, tingkat inflasi cukup fluktuatif dengan besaran rata-rata 8,69% dimana tingkat paling rendah adalah sebesar 2,00% (1999) dan paling tinggi 17,11% (2005). Fenomena inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, dan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Studi keterkaitan inflasi dan pertumbuhan ekonomi banyak menghasilkan temuan bahwa antara keduanya bisa berhubungan negatif atau bisa juga tidak ada korelasi yang signifikan. Bukti statistik di negara-negara berkembang Afrika dan Amerika Latin mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDB berdampak negatif terhadap inflasi.

Pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi laju inflasi walau dalam derajat yang tidak terlalu signifikan. Kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah adalah variabel lain yang memicu pergerakan inflasi. Sejumlah studi mencatat temuan-temuan mengejutkan dan menarik tentang interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter, khususnya ketika

otoritas moneter menargetkan inflasi. kebijakan fiskal disebut ekspansif apabila mampu secara langsung (temporer) mempengaruhi proses inflasi dengan cara mempengaruhi output nasional dan kemudian mereduksi inflasi; apabila efek yang ditimbulkannya berlawanan (meningkatkan inflasi) disebut kontraktif.

Pada bulan Desember 2010 terjadi inflasi sebesar 0,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 125,17. Dari 66 kota IHK, 65 kota mengalami inflasi dan 1 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe 2,97 persen dengan IHK 128,44 dan terendah terjadi di Singkawang 0,11 persen dengan IHK 126,26. Sedangkan deflasi terjadi di Sorong 1,30 persen dengan IHK 144,73.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan 2,81 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,21 persen; kelompok sandang 1,08 persen; kelompok kesehatan 0,16 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,07 persen dan

kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan 0,25 persen.

Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2010 dan laju inflasi year on year (Desember 2010 terhadap Desember 2009) masing-masing sebesar 6,96 persen.

Komponen inti pada bulan Desember 2010 mengalami inflasi sebesar 0,38 persen, laju inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Desember) 2010 dan laju inflasi komponen inti year on year (Desember 2010 terhadap Desember 2009) sebesar 4,28 persen.

Pada bulan Januari 2011 terjadi inflasi sebesar 0,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 126,29. Dari 66 kota IHK, 62 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Padang 3,70 persen dengan IHK 132,42 dan terendah terjadi di Manokwari 0,07 persen dengan IHK 138,19. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Sorong 1,07 persen dengan IHK 143,18 dan terendah terjadi di Ternate 0,32 persen dengan IHK 126,37.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada

kelompok bahan makanan 2,21 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,49 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,48 persen; kelompok sandang 0,15 persen; kelompok kesehatan 0,47 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,42 persen dan kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan 0,31 persen.

Pada Desember 2012 terjadi inflasi sebesar 0,54 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 135,49. Dari 66 kota IHK, pada bulan ini seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura 2,57 persen dengan IHK 132,71 dan terendah terjadi di Kendari 0,02 persen dengan IHK 141,15.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks seluruh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 1,59 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,17 persen; kelompok sandang 0,24 persen; kelompok kesehatan 0,18 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,05 persen; dan

kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,26 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada bulan Desember 2013 mencapai 0,55 persen. Sehingga inflasi sepanjang 2013 mencapai 8,38 persen. Sementara, secara year on year (yoy) inflasi inti mencapai 4,98 persen dan untuk Desember 2013 inflasi inti mencapai 0,45 persen. Inflasi terjadi karena dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan yang mencapai 0,2 persen.

Pada Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,00. Dari 82 kota IHK, tercatat seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke 4,53 persen dengan IHK 123,90 dan terendah terjadi di Meulaboh 1,17 persen dengan IHK 120,56.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks seluruh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 3,22 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 1,96 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 1,45 persen; kelompok sandang 0,64 persen;

kelompok kesehatan 0,74 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga 0,36 persen; serta transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 5,55 persen.

Pada Desember 2015 terjadi inflasi sebesar 0,96 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 122,99. Dari 82 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke 2,87 persen dengan IHK 131,04 dan terendah terjadi di Cirebon 0,27 persen dengan IHK 118,94.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 3,20 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,50 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,40 persen; kelompok sandang 0,09 persen; kelompok kesehatan 0,24 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,06 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,45 persen.

Pada Desember 2016 terjadi inflasi sebesar 0,42 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 126,71. Dari 82 kota IHK, 78 kota mengalami

inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe sebesar 2,25 persen dengan IHK sebesar 124,94 dan terendah terjadi di Padangsidempuan dan Tembilahan masing-masing sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing sebesar 125,36 dan 129,89. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,52 persen dengan IHK sebesar 125,64 dan terendah terjadi di Tegal sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 122,49.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,50 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,45 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,12 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok sandang sebesar 0,46 persen.

Pada Desember 2017 terjadi inflasi sebesar 0,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 131,28. Dari 82 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2,28 persen dengan IHK sebesar 131,75 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 0,18 persen dengan IHK sebesar 128,53.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 2,26 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17 persen; kelompok sandang sebesar 0,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,07 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,75 persen.

Pada Desember 2018 terjadi inflasi sebesar 0,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 135,39. Dari 82 kota IHK, 80 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kupang sebesar 2,09 persen dengan IHK sebesar 135,96 dan terendah terjadi di Banda Aceh

sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 128,20. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 134,89 dan terendah terjadi di Kendari sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 128,48.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 1,45 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,13 persen; kelompok sandang sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,20 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,10 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,28 persen.

Pada Desember 2019 terjadi inflasi sebesar 0,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 139,07. Dari 82 kota IHK, 72 kota mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Batam sebesar 1,28 persen dengan IHK sebesar 139,73 dan terendah terjadi di Watampone sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 135,06. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar

1,88 persen dengan IHK sebesar 138,34 dan terendah terjadi di Bukittinggi dan Singkawang masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 133,58 dan 137,78.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,78 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,09 persen; kelompok sandang sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,29 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05 persen. tembakau sebesar 0,86 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen; kelompok transportasi sebesar 0,30 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen;

kelompok pendidikan sebesar 0,12 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen. tembakau sebesar 0,86 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen; kelompok transportasi sebesar 0,30 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,12 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen.

Pada November 2020 terjadi inflasi sebesar 0,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,21. Dari 90 kota IHK, 83 kota mengalami inflasi dan 7 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,15 persen dengan IHK sebesar 106,83 dan terendah terjadi di Bima sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 104,48. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 104,81 dan terendah terjadi di Meulaboh dan Palopo masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 108,02 dan 104,21.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,86 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen; kelompok transportasi sebesar 0,30 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,12 persen; dan

kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen.

Pada Desember 2021, terjadi inflasi sebesar 0,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,66. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,91 persen dengan IHK sebesar 105,87 dan terendah terjadi di Pekanbaru sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 106,53. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Dumai sebesar 0,13 persen dengan IHK sebesar 107,70 dan terendah terjadi di Bukittinggi sebesar 0,04 persen dengan IHK sebesar 106,59.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,61 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar

rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,16 persen; kelompok transportasi sebesar 0,62 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,24 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen. Sementara kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan.<sup>15</sup>

Pada Desember 2022 terjadi inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen dengan IHK sebesar 119,83 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,26 persen dengan IHK sebesar 110,95.

---

<sup>15</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/02/1949/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-desember-2022-sebesar-5-51-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kotabaru-sebesar-8-65-persen-.html>

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,86 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,87 persen; kelompok transportasi sebesar 15,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen.

Pada September 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,44. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 5,26 persen dengan IHK sebesar 119,96 dan terendah terjadi di

Manado dan Gorontalo masing-masing sebesar 1,16 persen dengan IHK masing-masing sebesar 113,96 dan 113,23.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,17 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,98 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,26 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,97 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,58 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,68 persen.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/10/02/1958/september-2023-inflasi-year-on-year--y-on-y--sebesar-2-28-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-manokwari-sebesar-5-26-persen.html>

Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diberikan mandat melalui undang-undang untuk mengendalikan laju inflasi. Dalam upaya pengendalian inflasi, tentu saja Bank Sentral perlu bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang ujungnya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negative terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana sejarah inflasi di Indonesia yang memperlihatkan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak terkendali menyulitkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam menentukan konsumsi, investasi dan produksi.<sup>17</sup>

#### **b. Pengertian Inflasi**

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan

---

<sup>17</sup>Sirtal Sirtalya J Rando, Debby Ch. Rotinsulu, Ita Pingkan Fasnje Rorong, *Analisis Faktor-faktor Penentu Inflasi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.22 No.1 (2021).

perkonomian yang menunjukkan adanya kecendrungan kenaikan tingkat harga secara umum. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada dipasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam sehingga sebagian besar dari harga-harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi.

Di dalam sumber lain inflasi didefinisikan sebagai tingkat kenaikan tingkat harga umum secara menerus dalam periode tertentu. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sementara itu para ekonom modern mendefinisikannya sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang/komoditas.

Secara sederhana inflasi adalah kenaikan tingkat harga tahunan. Menurut Adiwarmanto Karim secara umum inflasi adalah kenaikan tingkat harga

secara umum dari barang/komoditas atau jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Menurut Raharja dan Manurung, Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.<sup>18</sup>

### c. Teori Inflasi

Para tokoh ekonomi telah menemukan banyak sekali definisi terkait dengan inflasi, namun untuk sampai sekarang belum memperoleh definisi yang tepat dan juga disetujui banyak para ahli ekonomi di seluruh dunia. Venieris dan Sebold mendefinisikan inflasi sebagai “a sustained tendency for general price” (Sutawijaya, 2012). Menurut definisi ini, naiknya harga yang bersifat umum dimana dalam kenaikannya hanya dalam waktu sekali saja bukan pendorong akibat penyebabnya inflasi. Definisi inflasi mencakup 3 pengertian diantaranya;

---

<sup>18</sup>Widiarsih Dwi, Reza Romandan . “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2019 Dengan Pendekatan Error Correction Model (ECM)” Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 10 No. 1, Juni 2020

1. potensi harga-harga untuk meningkat dengan tingkat harga yang cenderung naik turun pada saat tingkat harga actual atau biasa disebut sebagai Tendency.
2. naiknya harga yang bersifat terus-menerus dengan waktu yang lama atau biasa disebut sebagai Sustained
3. beragam tingkat harga barang universal yang tidak hanya dilihat dari satu macam barang saja atau biasa disebut sebagai General level of prices.<sup>19</sup>

#### a. Teori Keynes

mengatakan bahwa masyarakat yang mempunyai keinginan yang kuat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya merupakan penyebab dari adanya inflasi (Sopiana, 2012). Proses dari inflasi sendiri dapat dijabarkan dari proses perebutan yang menargetkan struktur yang lebih besar daripada kemampuan masyarakat yang tersedia. Dari proses ini muncul suatu kejadian yang disebut inflationary gap yang merupakan kelebihan jumlah yang tersedia dari masyarakat terhadap permintaan suatu barang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rencana pembelian suatu permintaan menjadi lebih efektif terhadap dana

---

<sup>19</sup>Sutawijaya Andrian, "Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia" Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol.8 No.2, (Maret 2012)

masyarakat. Apabila hal ini melebihi jumlah output yang tersedia dari banyaknya golongan masyarakat, maka akan berdampak harga-harga akan naik (inflationary gap akan meningkat). Sebaliknya apabila jumlah output tidak melebihi permintaan pembelian harga secara efektif yang dimana masyarakat tidak memperoleh dana, maka akan menimbulkan fenomena inflasi akan terhenti (atau bisa dikatakan inflationary dianggap akan hilang).<sup>20</sup>

#### b. Teori Jumlah Uang Beredar

Kebijakan bank sentral tidak hanya menentukan jumlah uang beredar saja melainkan mengontrol jumlah uang, baik antara rumah tangga pemegang uang dan bank yang menyimpan uang. Bentuk uang yang beredar di masyarakat meliputi mata uang asing dan deposito hasil transaksi rumah tangga pada bank-bank yang ada.  $M = C + D$ . Hal ini bisa disimpulkan dalam rumus diatas yang dimana M adalah jumlah uang beredar sama dengan hasil penjumlahan dari valuta asing sebagai C dan rekening giro (demand deposit) sebagai D.

---

<sup>20</sup> Sopiana, "Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI dan Inflasi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ke Tiga (DPK) Perbankan di Indonesia", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.10 No.1 (2012)

### c. Teori Suku Bunga

Menurut penjabaran dari Bank Indonesia (BI), suku bunga didefinisikan sebagai alat yang telah ditetapkan pada rapat Dewan Gubernur dengan jangka waktu setiap tiga bulan sekali (triwulan). Suku bunga ditetapkan sebagai acuan untuk mengendalikan moneter yang dimana bank menjaga rata-rata SBI 1 bulan berada pada tingkat yang seharusnya pada saat hasil lelang pasar terbuka. Hal tersebut bertujuan agar sesama bank sama-sama mempengaruhi suku bunga satu sama lain dan juga jangka waktu yang lebih lama. Penetapan SBI 1 bulan dilakukan perbuahan secara terus-menerus dan bertahap. Dengan menetapkan suku bunga tersebut, gubernur telah memikirkan beberapa hal yaitu:

1. Fungsi reaksi kebijakan yang mengatur suku bunga yang dianjurkan dengan model ekonomi dalam pencapaian inflasi secara tepat sasaran.
2. Kumpulan informasi-informasi ekonomi yang berguna seperti hasil-hasil riset ekonomi, pendapat para ahli, survey ekonomi, indicator makro ekonomi, dan sebagainya.

Sampai sekarang bank sentral telah menggunakan nilai suku bunga (BI rate) sebagai instrument dalam mengontrol tingkat inflasi. Pada saat terjadinya kasus kenaikan inflasi, maka Bank Indonesia melakukan tindakan dengan cara meningkatkan tingkat suku bungadengan harapan tingkat inflasi dapat menurun. Dari adanya perubahan pada tingkat suku bunga tersebut berdampak pada bagi pasar keuangan dan pasar modal. Naiknya tingkat suku bunga akan mengakibatkan naiknya beban bunga. Hal ini akan berdampak sangat berat terhadap perusahaan yang memiliki average yang cukup tinggi. Selain itu harga saham juga akan terkena dampaknya karena kenaikan ini berpotensi dapat mengurangi profitabilitas perusahaan

#### d. Teori Nilai Tukar

Menurut (Pangestuti, 2020) menjelaskan, nilai tukar dianggap sebagai acuan harga dari satu mata uang tertentu terhadap mata uang lain yang mencakup seluruh dunia. Sebagai contoh nilai uang Rupiah yang akan ditukarkan terhadap nilai uang USD Amerika. Nilai tukar menjadi indikator penting untuk dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, baik dari pasar

saham maupun pasar uang dengan investor sebagai pelaku. Untuk memulai investasi, investor mempunyai sikap untuk selalu berhati-hati dalam memilih perusahaan yang akan di investasikan.<sup>21</sup>

Hal ini sengaja dilakukan agar menghindari kesalahan fatal yang dapat merugikan baik terkait investor maupun perusahaannya sendiri. Menurut (Appa, 2014), penurunan kurs rupiah dapat memicu dampak negatif baik dari sisi ekonomi maupun pasar modal. Perekonomian Indonesia memiliki tekanan yang kuat terhadap nilai tukar. Hal ini semakin kuat dengan meningkatnya kegiatan ekonomi sejak pada krisis pada tahun 1998-1999, sebanyak 75 persen depresiasi nilai tukar dari tahun ke tahun.<sup>22</sup>

#### e. Teori Pengangguran

Pengangguran adalah keadaan dimana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Angkatan kerja adalah jumlah yang bekerja dan yang tidak bekerja berumur 15 – 55

---

<sup>21</sup> Pangestuti Dewi Cahyani . *Manajemen Keuangan Internasional*.(Yogyakarta : Penerbit Deepublish.2020)

<sup>22</sup>Putra novaldo yanescha”*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2020*”,Akuntansi,Bisnis,dan Keuangan vol.2,ISSUE.5 (2022).

tahun. Kesempatan kerja adalah jumlah pekerja berumur 15 – 55 tahun atau yang termasuk dalam angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. Pengangguran menunjukkan jumlah pekerja yang tidak bekerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan atau antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja yaitu rasio jumlah pengangguran dengan angkatan kerja  $\times 100\%$ . Menurut (BPS, 2017) pengangguran dapat dikelompokkan atas 4 yaitu sbb:

1. Pengangguran penuh / terbuka yaitu orang yang termasuk angkatan kerja tapi tidak bekerja dan tidak mencari kerja.
2. Setengah menganggur terpaksa yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu karena sesuatu sebab diluar kemauannya karena tidak / belum berhasil memperoleh pekerjaan meskipun mereka mencari dan bersedia menerima pekerjaan dengan upah lebih rendah dari yang diharapkan.
3. Setengah menganggur sukarela yaitu orang yang memilih lebih baik menganggur daripada menerima pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan

pendidikannya atau upah yang lebih rendah dari yang diharapkan.

4. Orang yang bekerja kurang dari yang sebenarnya (seharusnya) dapat dikerjakan dengan pendidikan/keterampilan yang dimilikinya. Penyebab Terjadinya Pengangguran

5. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang muncul karena adanya waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia.

6. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang muncul karena keterampilan yang diminta oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan keterampilan pencari kerja atau tidak adanya kesesuaian lokasi antara pekerjaan dan pencari kerja. Hal ini terjadi karena perubahan selera, teknologi, pajak atau kompetisi yang mengurangi permintaan keterampilan tertentu dan menaikkan permintaan keterampilan lain.

7. Pengangguran musiman yaitu pengangguran karena adanya perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

8. Pengangguran siklikal yaitu fluktuasi pengangguran karena siklus bisnis. Dampak pengangguran terhadap perekonomian sbb :

- 1) mengurangi output negara.
- 2) menurunkan taraf hidup yang diukur dengan pendapatan per kapita.
- 3) memperlambat proses pembangunan dimana jika produksi nasional turun maka pendapatan negara (pajak) juga turun sehingga dana untuk pembangunan infrastruktur juga turun,
- 4) meningkatkan angka kemiskinan, dimana tingkat pengangguran yang tinggi berdampak terhadap tingkat kemiskinan. Dampak sosial pengangguran sbb:

a) terganggunya ketenteraman keluarga karena kepala keluarga kehilangan penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga,

b) tingginya tindakan kriminal mengakibatkan orang tidak punya uang untuk biaya hidup diri sendiri dan keluarga, 3) tekanan jiwa dan

keyakinan diri dimana kurang percaya diri pada jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

#### **d. Inflasi Menurut Derajatnya**

Inflasi ringan di bawah 10% (single digit) Inflasi sedang 10% - 30%. Inflasi tinggi 30% - 100%. Hyperinflasi di atas 100%. Laju inflasi tersebut bukanlah suatu standar yang secara mutlak dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian di suatu wilayah tertentu, sebab hal itu sangat bergantung pada berapa bagian dan golongan masyarakat manakah yang terkena imbas ( yang menderita ) dari inflasi yang sedang terjadi.

#### **e. Inflasi Menurut Penyebabnya**

Demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan aggregate demand masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. Akibatnya, akan menarik (pull) kurva permintaan agregat ke arah kanan atas, sehingga terjadi excess demand, yang

---

<sup>23</sup> Yenni Del Rosa<sup>1</sup>, Imran Agus, Mohammad Abdilla, "Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter dan Pengangguran Terhadap Perekonomian Indonesia.", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas Vol 21 No 2, Juli 2019.

merupakan inflationary gap. Dan dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga-harga barang biasanya akan selalu diikuti dengan peningkatan output (GNP riil) dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi full-employment. Pengertian kenaikan aggregate demand seringkali ditafsirkan berbeda oleh para ahli ekonomi. Golongan moneterist menganggap aggregate demand mengalami kenaikan akibat dari ekspansi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan, menurut golongan Keynesian kenaikan aggregate demand dapat disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi; investasi; government expenditures; atau net export, walaupun tidak terjadi ekspansi jumlah uang beredar. Cost push inflation, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya aggregate supply curve ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan aggregate supply curve bergeser tersebut adalah meningkatnya harga faktor-faktor produksi (baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri) di pasar faktor produksi, sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditi di pasar komoditi. Dalam kasus cost push inflation kenaikan harga seringkali diikuti oleh kelesuan usaha.

## **f. Inflasi Menurut Asalnya**

Domestic inflation, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (open economy system). Dan, inflasi ini dapat 'menular' baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor. Terlepas dari pengelompokan-pengelompokan tersebut, pada kenyataannya inflasi yang terjadi di suatu negara sangat jarang (jika tidak boleh dikatakan tidak ada) yang disebabkan oleh satu macam / jenis inflasi, tetapi acapkali karena kombinasi dari beberapa jenis inflasi. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor-faktor ekonomi maupun pelaku-pelaku ekonomi yang benar-benar memiliki hubungan yang independen dalam suatu sistem perekonomian negara. Contoh : imported inflation seringkali diikuti oleh cost push inflation,

domestic inflation diikuti dengan demand pull inflation, dsb.<sup>24</sup>

## **D. Sumber Penyebab Dan Dampak Inflasi**

### **Sumber-Sumber Penyebab Inflasi**

Terjadinya inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan, meningkatnya biaya produksi maupun jumlah uang yang beredar.

#### **a. Tingginya Permintaan**

MarketPermintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu, kegiatan keagamaan, atau terkait dengan budaya atau perilaku. Hal ini akan mendorong permintaan agregat terhadap barang dan jasa sehingga mendorong kenaikan harga. Konsep dan Mekanisme Harga Dalam Islam Mekanisme Harga Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar Output (barang dan jasa) ataupun

---

<sup>24</sup>Atmadja Adwin.S, "Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999

input(faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal. Yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand dimana tidak ada unsur spekulasi.<sup>25</sup>

**b. Meningkatnya Biaya Produksi (cost push inflation)**

Apabila sektor produksi naik seperti bahan baku atau upah pegawai, maka produsen akan menaikkan harga supaya pendapatan keuntungan dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang.

**c. Jumlah Uang yang Beredar**

Peredaran uang yang tinggi di masyarakat juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini

---

<sup>25</sup> Parakkasi Idris Ekon, " *Inflasi Dalam Perspektif omi Islam* ", LAA MAISYIR, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016.

dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, maka harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Semakin meningkat daya beli masyarakat saat stok barang menipis, maka harga barang otomatis akan ikut naik.

Dampak inflasi biasanya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Pasalnya, ketika terjadi kenaikan harga barang maka daya beli mereka akan turun. Terjadinya penurunan daya beli menurut Bank Indonesia akan memberi efek berkelanjutan sehingga bisa menyebabkan pendapatan dan standar hidup menurun. Dalam jangka panjang hal ini bisa menyebabkan masyarakat yang miskin akan bertambah miskin. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi adalah pendapatan yang tidak seimbang. Artinya dalam hal ini ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi tetapi ada juga pihak-pihak yang justru diuntungkan dengan adanya inflasi tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Zulfikar Fahri "Inflasi : Pengertian, Faktor Penyebab, dan Dampaknya" detikEdu, Jumat, 04 Jun 2021 11:00 WIB.

#### **d. Devaluasi**

Devaluasi terjadi ketika suatu mata uang kehilangan nilainya dibandingkan dengan mata uang lainnya. Hal ini membuat impor menjadi lebih mahal dan dapat menyebabkan inflasi. Jika dolar AS mendevaluasi terhadap euro, dibutuhkan lebih banyak dolar untuk membeli jumlah euro yang sama. Jika sebuah bisnis mengimpor barang dari Eropa, mungkin perlu menaikkan harga untuk menutupi kenaikan biaya.

#### **e. Ekspektasi Inflasi**

Ketika perusahaan dan pekerja mulai mengkhawatirkan inflasi, ketakutan mereka dapat membuat mereka mengharapkan hasil inflasi yang lebih tinggi. Akibatnya, pekerja mungkin meminta upah yang lebih tinggi untuk mengimbangi peningkatan biaya hidup.

Tapi itu adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya: ketakutan mereka dapat memperburuk masalah. Untuk membayar upah yang lebih tinggi bagi pekerja mereka, perusahaan harus menaikkan harga mereka.

Ketika perusahaan berpikir bahan baku lebih mahal, mereka juga akan menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Gabungan, itu berarti ekspektasi inflasi dapat menyebabkan tingkat inflasi naik.<sup>27</sup>

#### **f.Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat**

##### **1.Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat**

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah,apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap,kenaikan upa htidak secepat kenaikan harga-harga,maka infalsi ini akan menurunkan upah rill setiap individu yang berpendapatan tetap.

##### **2.Memperburuk distribusi pendapatan**

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosatan niali rill dari pendapatnya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga.Akan tetapi,bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah dan bangunan dapat mempertahankan atau justru dapat menambah nilai rill kekayaannya.Dengan demikian

---

<sup>27</sup> Tambunan Tulus".*Sumber Inflasi dan Kebijakan Kontraktif di Indonesia.Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*",.volume XLIV.No.1.1996

inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan semakin tidak merata.

**g. Dampak inflasi yang di rasakan oleh para penabung, oleh kreditur/debitur dan produsen**

Dampak inflasi yang di rasakan oleh penabung yakni menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga namun jika tingkat inflasi melebihi nilai bunga tetap saja nilai mata uang akan menurun. Jika orang mulai enggan menabung maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang.

Adapun dampak inflasi yang di rasakan debitur yakni justru menguntungkan karena pada saat membayar utang kepada pihak kreditur nilai uang lebih rendah dari pada saat meminjam. Namun sebaliknya bagi kreditur maka inflasi ini merugikan karena ketika pengembalian utang dari pihak debitur nilai mata uang menurun dan kreditur mengalami kerugian karena pada nilai mata uang pada saat

peminjaman lebih tinggi di banding pada saat pengembaliannya.

#### **h.Dampak inflasi bagi perekonomian nasional**

1. Investasi berkurang
2. mendorong tingkat bunga
3. mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif
4. menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan
5. menimbulkan ketidak pastian keadaan ekonomi di masa mendatang
6. menyebabkan daya saing produk nasional berkurang
7. menimbulkan defisit neraca pembayaran
8. merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
9. meningkatnya jumlah pengangguran.<sup>28</sup>
10. Menurunkan kesejahteraan masyarakat
11. Distribusi pendapatan akan memburuk
12. Suku bunga akan meningkat
13. Distribusi barang tidak merata.

---

<sup>28</sup>Huda,nurul,et.al..*konomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group .2008).

### **i. Efek Terhadap Output**

Biasanya kenaikan inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga output turun atau produksi turun. Namun, dalam jangka pendek biasanya kenaikan inflasi disebabkan adanya kenaikan produksi. Keadaan ini biasanya ditandai dengan kenaikan harga barang terlebih dahulu kemudian kenaikan upah. Dengan begitu keuntungan pengusaha dapat naik dan keuntungannya dapat menaikkan jumlah produksi. Dalam jangka panjang dipastikan inflasi akan menurunkan daya beli dan menurunkan output.<sup>29</sup>

### **j. Indikator Inflasi**

Lazimnya, indikator untuk menghitung tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), sebuah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Karena itu, perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS. Dalam hal ini, BPS

---

<sup>29</sup> Prawoto.Nano.*Pengantar Ekonomi Makro*. (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada .2019)

akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang atau jasa.

Indikator Lain Inflasi Bank sentral juga menyebutkan bahwa indikator inflasi lainnya yakni berdasarkan international best practice, antara lain:

#### 1. Indeks Harga Konsumen

IHK adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang biasa dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Indeks Harga Konsumen digunakan untuk melihat inflasi dari sisi konsumen. Jadi, Indeks Harga Konsumen mengukur tingkat harga barang atau jasa yang dianggap mencerminkan konsumsi masyarakat secara rata-rata. IHK biasanya dihitung berdasarkan suatu survei biaya hidup di daerah perkotaan yang dilakukan secara berkala

#### 2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dan pembeli atau pedagang besar berikutnya. Transaksi ini terjadi dalam skala besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

3. Indeks Harga Produsen (IHP) Indikator ini mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan.<sup>30</sup>

### **E. Kebijakan Untuk Pengendalian Inflasi**

Inflasi merupakan masalah serius bagi kestabilan perekonomian suatu negara. Bila inflasi tidak segera diatasi akan menimbulkan naiknya harga barang, turunnya nilai mata uang, meningkatnya pengangguran dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Penyebab inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang beredar (Nopirin, 1992) di sisi lain jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat juga penyebab timbulnya inflasi. Dalam hal ini kebijakan sangat dibutuhkan dalam mengatasi inflasi terutama berhubungan dengan:

#### **a. Kebijakan moneter**

Yaitu segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar bisa meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>30</sup> Sirtal Sirtalya J Rando, Debby Ch. Rotinsulu, Ita Pingkan Fasnier Rorong, *Analisis Faktor-faktor Penentu Inflasi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.22 No.1 (2021).

masyarakat. Kebijakan moneter meliputi politik diskonto, kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas, kredit selektif dan politik sanering.

### **b. Kebijakan fiskal**

Yaitu kebijakan yang berhubungan dilakukan melalui instrumen dengan finansial pemerintah, menaikkan tarif pajak, mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah, melakukan pinjaman pemerintah.

### **c. Kebijakan non moneter**

Yaitu kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah dan jumlah uang beredar. Cara ini merupakan alternatif untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan cara sbb:

- 1) mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya, hal ini dilakukan pemerintah dengan harapan para pengusaha bisa menggenjot produksi agar lebih banyak lagi.
- 2) mempermudah masuknya barang impor, merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3) pemerintah melakukan pengawasan harga dan menetapkan harga maksimal, hal ini diharapkan agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik lagi.

4) pemerintah melakukan distribusi secara langsung..

5) mengatasi hyperinflation dengan melakukan pemotongan nilai mata uang.<sup>31</sup>

#### **d. Pengendalian Inflasi**

Bank Indonesia dan Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang sudah ditetapkan melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu (anchor) pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara setelah UU tersebut, dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia maka sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter

---

<sup>31</sup> Yenni Del Rosa<sup>1</sup>, Imran Agus, Mohammad Abdilla, "Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter dan Pengangguran Terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas Volume 21 No 2, Juli 2019.

Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (demand management) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Dalam hal ini kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, pasar tradisional dan modern pada beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota.

Bicara soal inflasi mau tidak mau harus melihatnya terhadap bentuk dari inflasi itu sendiri yaitu

inflasi merayap dan inflasi yang terus menerus berkelanjutan dan dianggap serius apabila melewati batas 5 %, serta bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi inflasi jenis ini. Zero inflation atau inflasi padanot persen menjadi harapan dan tujuan dari pemerintah dalam mengatasi system perekonomian nasional sangat sulit untuk bisa terwujud. Untuk menjaga stabilitas nasional di bidang ekonomi maka pemerintah perlu untuk menjaga tingkat inflasi jangan sampai melebihi 5 %. Salah satu upaya dari pemerintah guna mengatasi masalah inflasi ini adalah dengan melakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dengan cara pengurangan pengeluaran pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian keuangan sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>32</sup>

#### **e. Pengendalian Moneter dan Fiskal**

Pelaksanaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh dua istitusi yang berbeda ini tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana keduanya haruslah saling menyesuaikan kebijakan yang dibuatnya. Salah satu tindakan yang harus diambil oleh Bank Indonesia dalam

---

<sup>32</sup> Sayed Rahma, "Pengendalian Inflasi, Monetr dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," vol,5,no.1,2021

mengatasi masalah inflasi ini yaitu dengan cara mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga, di mana kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga. Sedangkan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian keuangan dalam bentuk kebijakan fiskal yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Kedua langkah ini dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi dan mengurangi pengeluaran rumah tangga (Sukirno, 2016).

Sebagai upaya untuk mengatasi inflasi maka salah satu kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia adalah dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yang menggantikan BI Rate dan diberi nama BI 7-Day (reverse) Repo Rate, yang mulai berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter.

Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam upaya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-Day (reverse) Repo Rate

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAMULIA BENGKULU

dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil, karena instrumen BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Sesuai dengan prinsip implementasi reformulasi, perubahan tersebut tidak mengubah arah kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI 7-Day Repo Rate berada dalam satu struktur suku bunga (term structure) yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya. Perbedaan hanya terlihat pada tenor instrumen, yakni BI Rate setara dengan instrumen moneter 12 bulan, sedangkan BI 7-Day Repo Rate setara dengan instrumen moneter 7 hari (BI, 2019). Paling tidak ada tiga dampak utama yang diharapkan dengan dipergunakannya instrumen BI 7-day (reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru yaitu (BI, 2019)

Dalam teori makro ekonomi kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Instrumen penting dalam kebijakan

fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Pemerintah merancang porsi yang pas antara penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai kestabilan ekonomi. Diantara beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang lazim dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain:

- a) Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga;
- b) Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu;
- c) Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha tertentu.<sup>33</sup>

Selain itu terdapat Peraturan Menteri Keuangan Dalam menangani inflasi contohnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi pada tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271 tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Intensif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Ktegori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

---

<sup>33</sup> Sayed Rahma, "Pengendalian Inflasi, Monetr dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam", vol,5,no.1,2021